



KATA PENGANTAR

MPAG (Marine Protected Areas Governance Project) merupakan bagian dari MRP – USAID (Marine Resource Program) bersama dengan IMACS, NOAA dan University Partnership. MPAG sebagai bantuan hibah dari USAID dirancang untuk memberikan dukungan teknis kepada Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan komitmen pendirian Kawasan Konservasi Perairan seluas 20 juta hektar dan dikelola secara efektif pada tahun 2020.

MPAG merupakan konsorsium dari 5 (lima) LSM yaitu:

- Conservation International (CI)
- Coral Triangle Centre (CTC)
- The Nature Conservancy (TNC)
- Wildlife Conservation Society (WCS)
- World Wide Fund for Nature Indonesia (WWF)

Implementasi program kerja dilakukan oleh konsorsium LSM yang dipimpin oleh WWF-US sebagai pemegang kesepakatan kerjasama dengan USAID. Pada komponen nasional, MPAG mendukung pembentukan sistem MPA nasional, sedangkan di tingkat lapangan MPAG mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan yang lebih efektif.

Dengan nilai hibah sebesar USD 8.125.000 (delapan juta seratus dua puluh lima ribu USD), sejak awal 2012 hingga akhir 2014, MPAG bekerja bersama mitra dari unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota, Universitas-Universitas, LSM lokal, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

Kini proyek MPAG telah berakhir. Kami berusaha agar hasil dari kerjasama selama 3 (tiga) tahun ini dapat didokumentasikan dengan baik. Ke depan, diharapkan koleksi dokumen ini dapat digunakan oleh banyak pihak sebagai bahan pembelajaran, rujukan penelitian serta kegunaan lainnya, baik oleh kalangan Pemerintah, LSM, akademisi hingga praktisi penggiat konservasi perairan.

Beberapa dokumen adalah produk regulasi atau kebijakan Pemerintah, dimana MPAG ikut serta dalam proses penyusunannya. Kepemilikan dari dokumen tersebut ada pada pihak Pemerintah. Termasuk hasil penelitian, buku-buku panduan, contoh rencana pengelolaan, *Standard Operating Procedures* dan sebagainya. MPAG tidak mengklaim kepemilikan dan hak cipta dari dokumen-dokumen ini, karena peran yang dijalankannya adalah sebagai fasilitator berbagai pihak terkait.

Kumpulan dokumen ini merupakan akumulasi kerjasama, komitmen dan kerja keras seluruh pihak mitra kerja MPAG. Pada kesempatan ini, kami sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua yang terlibat dalam proses pembuatannya. Semoga semua kontribusi yang telah diberikan dapat membantu semua pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi yang lebih efektif.

Kami berharap Koleksi Dokumen ini tidak hanya dilihat sebagai kumpulan dokumen belaka. Di dalamnya terdapat kumpulan pengalaman yang sepatutnya disebarkan sebagai bahan pembelajaran bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, komunitas masyarakat, pengusaha terkait, mahasiswa perguruan tinggi, peneliti serta pihak lainnya.

Akhirnya, dilandasi semangat berbagi, semua isi dalam Koleksi Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Konservasi di Indonesia kami usahakan untuk dapat diakses dengan mudah. Selain melalui fisik dokumen dan flash-disk yang dibagikan, dokumen dapat diunduh dari situs resmi Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (Direktorat KKJI- KKP) pada alamat: <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/en/dokumen>, Akses lainnya melalui website DropBox.com dengan alamat: <http://bit.ly/1Cg4vvn>

Jakarta, Februari 2015

Dr. Pahala Nainggolan – MPAG Chief of Party

Rudyanto, MA – MPAG Conservation Coordinator

Andie Wibianto, S.Sos – MPAG Communication Coordinator

Daftar Isi dan Penjelasan Singkat

Koleksi Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

KATA PENGANTAR

Web Data dan Masukan Ilmiah

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DNA PULAU-PULAU KECIL (E-KKP3K)

Bagian ini berisi alat ukur efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang diterbitkan oleh Direktorat KKJI, disingkat sebagai E-KKP3K. Selain alat ukur, bagian ini juga berisi 7 (tujuh) buku panduan teknis bagi para pengelola kawasan. Panduan praktis merujuk pada butir-butir yang ada di dalam E-KKP3K dan bertujuan untuk membantu para pengelola untuk meningkatkan status efektivitas pengelolaan kawasan

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor Kep.44/KP3K/2012 Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K)
- Buku E-KKP3K
- Panduan Identifikasi Potensi dan Pemantauan Biofisik
- Panduan Kelembagaan
- Panduan Pembiayaan Pengelolaan
- Panduan Penetapan
- Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi
- Panduan Penilaian dan Pemantauan Sarana dan Prasarana
- Penilaian Potensi dan Pemantauan Aspek Sosial-Budaya dan Ekonomi

KEMITRAAN

Bagian ini berisi kertas kerja yang disusun untuk bahan penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan para pemangku kepentingan yang ada – *collaborative management*. Selain itu, juga berisi kebijakan pemerintah dalam bentuk Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi)

- Kemitraan Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 114/35.F/BAPPEDA/2013 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Gili Matra (FKKP TWP Gili Matra)

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN UNTUK RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI

Bagian ini berisi contoh-contoh dokumen tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dari 10 lokasi kawasan baik dengan perbedaan luasan, pengelolaan oleh kementerian dan pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pada *flash-disk* dan *web-site* tersedia versi lengkap dari dokumen Rencana Pengelolaan masing masing kawasan ini.

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2034
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2014 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung di Propinsi Bali
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Laut Banda di Provinsi Maluku Tahun 2014-2034
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2034
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Tahun 2014-2034
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut Sekitarnya di Provinsi Maluku Tahun 2014-2034

MASUKAN ILMIAH (*Scientific Inputs*)

Bagian ini berisi kumpulan tulisan lebih dari 15 tesis dan disertasi yang terkait antara lain dengan pemanfaatan kawasan konservasi dan konektivitas dari mahasiswa Universitas Hasanuddin; mahasiswa pelbagai universitas yang diedit oleh PKSPL-Institut Pertanian Bogor. Demikian juga dokumen lain berupa kajian cepat tentang status keanekaragaman hayati, sosial ekonomi di kawasan perairan Anambas dan Bali, kajian atas suatu isu, dokumen pembelajaran serta analisis spasial untuk pencapaian target 20 Juta hektar pada tahun 2020.

- Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan Untuk Perikanan Berkelanjutan di Indonesia
- Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (Bunga Rampai)
- Kajian Dampak Kebijakan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- Scientific Input for Bali Marine Protected Area Network Development
- Implementasi Pengelolaan Kolaboratif di Kawasan Konservasi Perairan/Taman Wisata Perairan Gili Matra, Lombok Utara
- Pembelajaran MPAG Anambas-Bali MPA Network- Raja Ampat
- Spatial Analysis to Achieve 20 Million Hectares of Marine Protected Areas for Indonesia by 2020
- Kajian Manfaat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bagi Perikanan Berkelanjutan
- Kajian Manfaat Kawasan Konservasi Perairan Bagi Pengembangan Ekowisata Bahari

MEKANISME SUMBER PENDANAAN

Bagian ini berisi kajian mengenai berbagai mekanisme pendanaan serta alternatif sumber pendanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang tersedia saat ini di Indonesia.

- Mekanisme dan Alternatif Sumber Pendanaan Bagi Kawasan Konservasi Perairan

MARINE RAPID ASSESSMENT (MRAP)

Bagian ini berisi kajian cepat yang dilakukan untuk mendapatkan status terkini tentang keanekaragaman hayati, struktur komunitas, kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait, dan status sosial ekonomi di kawasan Anambas dan Bali.

- Marine Rapid Assessment of the Anambas Islands Marine Tourism Park
- Bali Marine Rapid Assessment Program 2011

POLICY BRIEF

Pada bagian ini berisi 7 (tujuh) kajian singkat yang dibuat berdasarkan *data base* konservasi yang ada pada Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI). Kajian ini diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan pembangunan kebijakan yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi.

- Analisis Kawasan Konservasi Perairan Berbasis Ekoregion
- Kolaborasi Penegakan Hukum di Wilayah Konservasi Perairan
- Meningkatkan Manfaat Ekonomi di Kawasan Konservasi Perairan
- Perkembangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah
- Peta Kawasan Konservasi Perairan Indonesia
- Prioritas Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- Tilik Kaji Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

PRIORITAS GEOGRAFI

Buku Prioritas Geografis menggambarkan peringkat keanekaragaman hayati untuk setiap *ecoregion* di Indonesia

- Prioritas Geografi

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP), Protokol dan Kode Etik

Berisi beberapa SOP, Protokol, kode etik dan dokumen sejenis yang dibuat dan telah digunakan sebagai panduan teknis untuk pengelolaan kawasan. Dokumen disusun berdasarkan kondisi pelbagai kawasan konservasi di Indonesia, dengan demikian perlu dilakukan adaptasi dan modifikasi bila ingin diterapkan pada kawasan yang lainnya.

- Kode Etik Berinteraksi Dengan Ikan Mola-Mola dan Pari Manta- Nusa Penida
- Kode Etik Bagi Operator Penyelaman- Nusa Penida
- Patroli di Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida Kabupaten Klungkung
- Protokol Biofisik Monitoring Kesehatan Karang KKP Nusa Penida
- Protokol Program Monitoring Pemanfaatan Sumber Daya Laut Nusa Penida - Klungkung
- Penguatan Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Gili Matra
- Penguatan Institusi Taman Wisata Perairan Gili Matra
- Sarana dan Infrastruktur Taman Wisata Perairan Gili Matra
- Pengamatan Insidental di Kabupaten Maluku Tenggara
- Panduan Program Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Maluku Tenggara
- Investasi Budidaya di Wilayah KKPN, Balai KKPN Kupang
- Operasi Kapal Patroli KKPN Kupang
- Operasi Pengamanan KKPN Oleh PPNS Perikanan
- Operasi Pengamanan KKPN Oleh Tim Terpadu (Operasi Bersama)
- Penelitian Bagi Waraga Negara Asing di Wilayah KKPN
- Penguatan Kelembagaan Masyarakat – Budidaya, Balai KKPN Kupang
- Penguatan Kelembagaan Masyarakat – Kelompok Wanita KKPN
- Penguatan Kelembagaan Masyarakat KKPN – Balai KKPN Kupang
- Penguatan Kelembagaan Masyarakat – Penangkapan Ikan
- Penguatan Kelembagaan Masyarakat – Pokmaswas, Balai KKPN Kupang
- Protokol Pemantauan Padang Lamun di Taman Nasional Perairan Laut Sawu
- Protokol Pemanfaatan Sumber Daya di Taman Nasional Perairan Laut Sawu
- Protokol Pemantauan Kesehatan Terumbu Karang di Taman Nasional Perairan Laut Sawu
- Standard Operating Procedure (SOP) Website Data dan Informasi

PENDEKATAN EKOSISTEM DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN (EAFM)

Bagian ini berisi keputusan Dirjen Perikanan Tangkap – Kementerian Kelautan dan Perikanan dan lampirannya yang antara lain berisi tentang *EAFM-Ecosystem Approach in Fisheries Management* – Pengelolaan perikanan yang mengadopsi pendekatan ekosistem; indikator-indikator yang digunakan dalam EAFM serta contoh hasil pengukuran suatu perairan dengan menggunakan indikator EAFM. Pada bagian ini juga terdapat Rencana Pengelolaan Perikanan untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan-WPP 718 yang telah disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada bagian akhir, terdapat Buku Putih Tuna Indonesia yang merupakan kumpulan kertas kerja pada Simposium Tuna yang diselenggarakan di Bali pada bulan Desember 2014. Analisis serta rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih baik dapat diperoleh dari kertas kerja yang dipaparkan

- Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 18/KEP-DJPT/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem dan Lampirannya
- Indikator Keberhasilan Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*) dan Penilaian Awal Pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia
- Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan Menggunakan Indikator EAFM
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Buku Putih Pengelolaan Perikanan Tuna-Tongkol-Cakalang di Indonesia

REGULASI

Pada bagian ini disajikan dokumen Cetak Biru Jejaring KKP Bali yang merupakan dokumen kesepakatan para Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Bali untuk mengelola kawasan konservasi secara berjejaring di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Disamping itu disajikan pula Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan kawasan konservasi secara berjejaring.

JEJARING KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

- Cetak Biru Jejaring KKP Bali
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 Tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan
- Keputusan Bupati Jembrana Nomor 778/DKPK/2013 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Jembrana

PENINGKATAN KAPASITAS

Bagian berisi modul modul untuk pelatihan disain dan perencanaan kawasan konservasi yang merupakan bahan pelatihan untuk diujikan dalam pelatihan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) yang bersertifikat untuk pengelola kawasan konservasi. Selain modul, disajikan pula peraturan pemerintah yang terkait dengan pelatihan bersertifikat SK3 yang merupakan implementasi dari Sistem Pelatihan Nasional berbasis kompetensi di Indonesia. Selain modul diatas, terdapat juga modul untuk para peserta pelatihan pengukuran kinerja pengelolaan perikanan dengan menggunakan indikator EAFM.

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS (SK3)

- Jenis dan Tingkat Kompetensi Untuk Setiap Kategori Posisi Personil
- Modul 01 Melakukan Kegiatan Persiapan Awal Perencanaan
- Modul 02 Merumuskan Masalah Yang Akan Ditangani
- Modul 03 Menyusun Strategi Pengelolaan

- Modul 04 Membuat Konsep Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Yang Efektif
- Modul 05 Membuat Konsep Rencana Pemantauan Kawasan Konservasi Perairan
- Modul 06 Membuat Draft Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.09/MEN/2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2013 Tentang Kompetensi Kerja Khusus Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

MODUL KURIKULUM PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM

- Modul Penilaian Indikator Untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELEMBAGAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

- Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pada bagian ini tersaji beberapa dokumen yang dihasilkan dari masing masing kawasan konservasi yang diharapkan dapat dirujuk atau diduplikasi oleh pengelola kawasan konservasi lainnya.

WAKATOBI

- Rencana Pengelolaan Pariwisata Wakatobi

KEI KECIL

- Studi Kelembagaan Masyarakat Lokal Kei Kecil Bagian Barat Kabupaten Maluku Tenggara

BERAU

- Identifikasi CAP Biduk-Biduk
- Identifikasi CAP Tanjung Batu
- Hasil Rumusan Para Ahli

- Keputusan Bupati Berau Nomor 516 Tahun 2013 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Taman Pesisir Kepulauan Derawan
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Berau

NUSA PENIDA

- Business Plan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Penida
- Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung

RAJA AMPAT

- Kumpulan Surat Keputusan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah
- Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

SAVU

- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74/KEP/HK/2013 Tentang Dewan Konservasi Propinsi Nusa Tenggara Timur
- Membangun Tata Kelola dan Kelembagaan Kawasan Konservasi Perairan

PENDANAAN BERKELANJUTAN

BACKGROUND PAPER

- Background Paper Dana Perwalian (*Trust Fund*) Sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan Bagi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia

KAJIAN SISTEM KEUANGAN PEMERINTAH

- Kajian Sistem Keuangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Hibah Luar Negeri

FACT SHEET

- Fact Sheet Pendanaan Berkelanjutan

STUDI WISATA KE SELANDIA BARU

Pada bagian ini diberikan gambaran mengenai proses perjalanan studi wisata ke Selandia Baru dan pembelajaran yang didapat dari perjalan tersebut yang dikategorikan dalam 8 topik terpilih.

- Studi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- 8 Tulisan Inspiratif Laporan Perjalanan Praktisi Konservasi Kawasan Perairan Indonesia